



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 131 /KEP/HK/2025

TENTANG

TIM FASILITASI PENATAAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN/KOTA SE-NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat proses penataan kelembagaan perangkat daerah kabupaten/kota se-Nusa Tenggara Timur Tahun 2025, perlu dilakukan fasilitasi terhadap besaran organisasi perangkat daerah, susunan perangkat daerah, perumpunan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, tugas dan fungsi perangkat daerah serta tata kerja perangkat daerah;
- b. bahwa untuk kelancaran kegiatan fasilitasi penataan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk tim fasilitasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Fasilitasi Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri....

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016 Nomor 009, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 008) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 006, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0130);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Fasilitasi Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur Tahun 2025.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas memfasilitasi penataan kelembagaan perangkat Daerah Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur Tahun 2025.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – Unit SKPD) Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.

KEENAM

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 25 April 2025

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

TTd.

KOSMAS D. LANA

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Anggota tim masing-masing di Tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H

NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 131 / KEP / HK / 2025

TANGGAL : 25 April 2025

TENTANG TIM FASILITASI PENATAAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SE-NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM FASILITASI PENATAAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SE-NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025

No	Nama	Kedudukan Dalam Tim	Rincian Tugas
1.	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Pengarah	memberikan arahan secara umum terkait pelaksanaan tugas Tim.
2.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Penanggung jawab	bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Tim.
3.	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Ketua	memimpin secara langsung pelaksanaan kegiatan dimaksud dan berkoordinasi dengan unit/instansi lain.
4.	Kepala Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Sekretaris	membuat perencanaan dan langkah-langkah pelaksanaan kegiatan serta memfasilitasi seluruh kegiatan.
5.	Ardi Arizon Koreh, SE, M.Si / Analis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	a. mengatur secara teknis tentang mekanisme pelaksanaan kegiatan fasilitasi penataan kelembagaan perangkat daerah kabupaten/kota se-NTT;
6.	Marsella A. M. Bilik, SE, MM / Analis Sumber Daya Aparatur Ahli Muda pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	b. menyiapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatan fasilitasi penataan kelembagaan perangkat daerah kabupaten/kota se-NTT;
7.	Tomy Tamelan, S.Tr. IP / Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	c. melakukan validasi dokumen usulan penataan kelembagaan perangkat daerah kabupaten/kota se Nusa Tenggara Timur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
8.	Emiliana Kresensia Bhara, S.I.Kom / Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	d. menyusun jadwal rapat pembahasan asistensi kelembagaan perangkat daerah kabupaten/kota se Nusa Tenggara Timur;
			e. menyiapkan materi, daftar hadir, notulen, berita acara dan dokumentasi rapat pembahasan asistensi kelembagaan perangkat daerah kabupaten/kota se-NTT;
			f. menghimpun semua peralatan, bahan-bahan rapat, dan melakukan pekerjaan lain yang berkaitan dengan asistensi

No	Nama	Kedudukan Dalam Tim	Rincian Tugas
			<p>penataan kelembagaan perangkat daerah kabupaten/kota se-NTT;</p> <p>g. menyiapkan rekomendasi penataan kelembagaan perangkat daerah kabupaten/kota se-NTT;</p> <p>h. menyampaikan surat ke kabupaten/kota hasil rekomendasi penataan kelembagaan perangkat daerah kabupaten/kota se-NTT; dan</p> <p>i. bertanggung jawab kepada Ketua Tim berkaitan dengan kegiatan fasilitasi penataan kelembagaan perangkat daerah kabupaten/kota se-NTT.</p>

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

Ttd.

KOSMAS D. LANA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001